

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKAL PINANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE OKA ASTAWA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 885574

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.560.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah Seluas 2376 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 758.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 20P-RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ 1,5 RS CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 234.389.040**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 446.785.852**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.999.174.892



III. HUTANG

Rp. 351.813.141

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.647.361.751

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.